

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kota Bukittinggi dan Padang merupakan kota yang terletak di provinsi Sumatra Barat. Meskipun terletak di provinsi yang sama, bukan berarti kondisi dan karakteristik masing-masing daerah tersebut juga sama. Salah satu penyebab perbedaan-perbedaan yang muncul adalah kondisi geografis provinsi Sumatra Barat itu sendiri.

Letak geografis provinsi Sumatra Barat yaitu berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, provinsi Riau, Jambi, dan Sumatra Utara. Ketinggian permukaan daratannya juga sangat bervariasi. Sebagian besar daerahnya berada pada dataran tinggi dan sebagian lainnya berada pada dataran rendah.<sup>1</sup> Kondisi-kondisi tersebutlah yang memicu perbedaan kondisi dan karakteristik kota Bukittinggi dengan Padang.

Kota Bukittinggi dan Padang memiliki kondisi geografis yang berbeda. Diantara perbedaannya terlihat pada letak, ketinggian, dan luas daerah. Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatra. Bukittinggi dikelilingi oleh dua gunung yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Ketinggian kota ini berkisar antara 780-950 meter di atas permukaan laut seta memiliki luas sekitar 25,239 km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Adapun kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatra. Kota ini berbatasan dengan

---

<sup>1</sup> Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat, *Statistik Daerah Provinsi Sumatra Barat 2016* (Sumatra Barat: BPS, 2016), hlm. 1 dan 4.

<sup>2</sup> Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, *Bukittinggi dalam Angka 2016* (Bukittinggi: BPS, 2016), hlm. 3.

laut dan dikelilingi oleh perbukitan. Padang memiliki ketinggian antara 0-1853 meter di atas permukaan laut serta luas wilayah sekitar 694,96 km<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

Potensi yang dimiliki suatu daerah biasanya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan potensi antara satu daerah dengan daerah lainnya dilandasi oleh berbagai macam faktor. Salah satu faktornya adalah kondisi geografis daerah tersebut. Secara umum potensi daerah terbagi tiga yaitu potensi alam, sosial budaya, dan sumberdaya manusia. Kondisi geografis tersebut berdampak kepada potensi suatu daerah terutama pada potensi alamnya. Hal tersebut dapat terlihat pada potensi kota Bukittinggi dan Padang. Perbedaan kondisi geografis kedua kota tersebut berdampak kepada berbedanya potensi alam yang dimiliki.

Potensi alam suatu daerah meliputi segala kenampakan alam beserta sumber daya alam yang dimilikinya. Potensi alam kota Bukittinggi terdiri dari wilayah dataran tinggi dan perairan darat. Adapun kota padang memiliki potensi alam yang lebih kompleks mencakup wilayah dataran tinggi maupun rendah, perairan laut dan darat. Sebagai daerah dataran tinggi, tentunya Bukittinggi memiliki potensi udara yang sejuk dan kaya akan objek wisata alam. Selain itu, Bukittinggi juga memiliki potensi perairan darat berupa sumber daya yang berasal dari sungai-sungai yang ada. Adapun potensi alam kota Padang yang tidak dimiliki kota Bukittinggi adalah potensi wilayah dataran rendah dan perairan lautnya. Wilayah dataran rendah yang berdekatan dengan

---

<sup>3</sup> Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Padang dalam Angka 2016* (Padang: BPS, 2016), hlm. 5.

perairan laut tentunya menjadikan Padang berpotensi pada objek wisata pantai dan segala potensi sumber daya lautnya.

Perbedaan antara kota Bukittinggi dengan Padang tidak hanya terlihat pada potensi alamnya, tetapi juga pada potensi sumber daya manusianya. Jumlah penduduk kota Bukittinggi tahun 2015 adalah 122.621 jiwa.<sup>4</sup> Pada tahun yang sama, jumlah penduduk kota Padang adalah 902.413 jiwa. Hal yang menarik adalah Bukittinggi merupakan kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Sumatra Barat yaitu 4.858 jiwa/km<sup>2</sup>. Adapun kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Sumatra Barat. Selain itu, di Sumatra Barat hanya terdapat dua kota yang telah mengalami masa bonus demografi yaitu Bukittinggi dan Padang. Artinya penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif.<sup>5</sup>

Potensi lain yang dimiliki kota Bukittinggi dan Padang adalah sosial budayanya. Potensi sosial budaya merupakan potensi yang terdapat pada kehidupan masyarakat. Tradisi dan adat istiadat yang unik, nilai-nilai sejarah yang dimiliki, serta eloknya kesenian daerah merupakan potensi sosial budaya yang dapat dikembangkan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan potensi daerah yaitu dengan menciptakan sektor-sektor pendukung yang potensial dan cocok dengan masing-masing potensi daerah tersebut. Pemerintah daerah melimpahkan wewenangnya kepada masing-masing satuan kerja (Dinas) untuk mengelola potensi daerah yang sesuai dengan bidang atau sektornya. Setiap

---

<sup>4</sup> Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, *Bukittinggi dalam Angka 2016*, op.cit., hlm. 33.

<sup>5</sup> Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat, *Profil Penduduk Provinsi Sumatra Barat Hasil SUPAS 2015* (Sumatra Barat: BPS, 2016), hlm. 5-13.

Dinas harus bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi dengan merancang program-program kerja yang tepat dan mengupayakan tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Baiknya kinerja dinas-dinas diharapkan mampu meningkatkan kualitas potensi yang ada, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi daerah.

Kota Bukittinggi dan Padang harus mengenali semua bentuk potensi daerahnya. Semua potensi daerah yang berupa potensi alam, sosial budaya, dan sumber daya manusianya harus disertai dengan sektor-sektor pendukung yang potensial. Terdapat tiga sektor potensial unggulan untuk memanfaatkan potensi-potensi kota Bukittinggi dan Padang yaitu sektor pariwisata, perdagangan, dan pendidikan.

Sektor pariwisata sangat potensial bagi kota Bukittinggi dan Padang karena memiliki potensi alam yang indah dan sosial budaya yang kaya akan nilai-nilai sejarah. Potensi-potensi tersebut sangat cocok dimanfaatkan sebagai objek wisata. Objek wisata tersebut berupa objek wisata alam, sejarah, bahari, dan lain sebagainya.

Kota Bukittinggi memiliki objek wisata potensial pada wisata alam dan sejarahnya. Salah satu objek wisata alam unggulan kota Bukittinggi adalah Ngarai Sianok. Adapun wisata sejarah yang menjadi ikon kota Bukittinggi yaitu Jam Gadang dan Lobang Jepang.

Objek wisata bahari dan sejarah merupakan wisata unggulan kota Padang. Memiliki garis pantai yang panjang dan pulau yang banyak sangat potensial untuk dijadikan objek wisata. Diantara objek wisata bahari kota

Padang yaitu Pantai Aie Manih, adapun wisata sejarah seperti Museum Adityawarman.

Beragamnya objek wisata yang ditawarkan kota Bukittinggi dan Padang harus didukung oleh baiknya pengelolaan terhadap objek wisata tersebut. Pengelolaan objek wisata yang baik akan menghasilkan objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Hal tersebut dapat memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Pada tahun 2015, total wisatawan yang berkunjung ke kota Bukittinggi adalah 460.905 orang yang terdiri dari 434.935 wisatawan domestik dan 25.970 wisatawan asing.<sup>6</sup> Sementara itu, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Padang adalah sebanyak 3.355.772 orang yang terdiri dari 3.298.454 wisatawan domestik dan 57.318 wisatawan asing.<sup>7</sup>

Banyaknya wisatawan berdampak kepada munculnya peluang usaha penunjang sektor pariwisata. Salah satu usaha penunjang pariwisata adalah penyediaan jasa akomodasi hotel. Dengan banyaknya hotel, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada setiap wisatawan. Tahun 2015, jumlah hotel di Sumatra Barat yaitu 371 buah. Kota Bukittinggi dan Padang merupakan kota dengan penyedia hotel terbanyak di provinsi Sumatra Barat. Jumlah hotel di Bukittinggi adalah 66 buah dengan total kamar sebanyak 1.703 buah. Adapun jumlah hotel di Padang adalah sebanyak 110 buah dengan total kamar sebanyak 3.323 buah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, *Bukittinggi dalam Angka 2016*, *op.cit.*, hlm. 224.

<sup>7</sup> Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Padang dalam Angka 2016*, *op.cit.*, hlm. 331

<sup>8</sup> Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat, *Sumatra Barat dalam Angka 2016*, *op.cit.*, hlm. 573 dan 576.

Sumatra Barat memiliki tiga lapangan usaha utama yang memberikan andil terhadap pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Persentase lapangan usaha tersebut yakni sektor pertanian sebesar 24,84 persen, perdagangan sebesar 14,68 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 12,05 persen.<sup>9</sup>

Sektor perdagangan merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar di kota Bukittinggi. Kontribusi yang diberikan oleh sektor perdagangan sebesar 33,64 persen. Persentase tersebut merupakan yang tertinggi di provinsi Sumatra Barat. Selain itu, kota Bukittinggi juga berperan sebagai daerah dengan penyumbang ketiga terbesar pada sektor perdagangan Sumatra Barat yaitu 7,84 persen.<sup>10</sup>

Sama halnya dengan kota Bukittinggi, kontribusi sektor perdagangan juga menjadi yang tertinggi di kota Padang. Besarnya kontribusi sektor tersebut adalah 16,86 persen. Walaupun persentase tersebut bukan yang tertinggi, sektor perdagangan kota Padang merupakan penyumbang terbesar bagi sektor perdagangan Sumatra Barat yaitu 28,72 persen.<sup>11</sup>

Sektor potensial lain dari kota Bukittinggi dan Padang adalah pendidikannya. Sektor pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membangun potensi sumber daya manusia. Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat diharapkan semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya. Semakin baik kualitas

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 746.

<sup>10</sup> Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat, *Perkembangan Ekonomi Sumatra Barat* (Sumatra Barat: BPS, 2016), hlm. 41 dan 50.

<sup>11</sup> *Ibid.*

sumber daya manusianya diharapkan semakin baik pula kualitas hidup dan kesejahteraan suatu masyarakat.

Tingginya tingkat kepadatan penduduk kota Bukittinggi dan banyaknya jumlah penduduk kota Padang harus didukung oleh baiknya pendidikan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengelola pendidikan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan tersebut.

Salah satu syarat sarana dan prasarana pendidikan suatu daerah dikatakan baik adalah tersedianya gedung sekolah disetiap jenjang pendidikan. Kota Bukittinggi dan Padang telah mampu menyediakan sekolah mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi. Jumlah sekolah mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi di kota Bukittinggi adalah sebanyak 188 buah.<sup>12</sup> Adapun kota Padang yakni sebanyak 681 buah.<sup>13</sup>

Sarana dan prasarana yang memadai akan membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas yang baik merupakan salah satu cerminan dari berhasilnya pengelolaan terhadap sektor pendidikan suatu daerah. Diantara indikator untuk menilai keberhasilan suatu pemerintah dalam mengelola pendidikan yaitu bobot dan persentase siswa SLTA yang diterima di Perguruan Tinggi. Penilaian lain yang bisa dijadikan indikator adalah tingginya nilai rata-rata Ujian Nasional (UN).

Pengelolaan pendidikan di kota Bukittinggi dapat dikatakan baik dan berhasil di provinsi Sumatra Barat. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya prestasi sektor pendidikan yang diperoleh. Diantara prestasi kota Bukittinggi

---

<sup>12</sup> Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, *Bukittinggi dalam Angka 2016*, *op.cit.*, hlm. 60 .

<sup>13</sup> Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Padang dalam Angka 2016*, *op.cit.*, hlm. 94.

adalah meraih peringkat ketiga sebagai kota pengelola pendidikan terbaik di Sumatra Barat pada tahun 2015. Penghargaan gubernur tersebut bukanlah yang pertama kali diraih kota Bukittinggi. Tiga tahun berturut-turut sebelum itu, kota Bukittinggi bahkan berhasil mempertahankan gelarnya sebagai yang terbaik di Sumatra Barat.<sup>14</sup> Selain prestasi kota, SMAN 1 Bukittinggi juga meraih peringkat pertama pengelola pendidikan terbaik tahun 2014 dan peringkat ketiga tahun 2015 dengan indikator penilaian banyak siswa yang diterima di Perguruan Tinggi.<sup>15</sup> Pada tahun 2015, Bukittinggi juga meraih nilai Ujian Nasional tertinggi se-Sumatra Barat pada kelompok IPA dan IPS SMA/MA sederajat, serta SMK.<sup>16</sup>

Kota Padang juga merupakan kota yang cukup berhasil dalam mengelola pendidikan. Pada tahun 2014, kota Padang berhasil meraih peringkat ketiga atas penghargaan gubernur untuk pengelola pendidikan terbaik se-Sumatra Barat. Untuk kategori sekolah, SMAN 1 Padang meraih peringkat kedua pada tahun 2014 dan menjadi yang terbaik pada tahun 2015.<sup>17</sup> Berdasarkan indikator nilai Ujian Nasional tahun 2015, Padang berada di peringkat ketiga tertinggi pada tingkat SMA/MA sederajat, serta di peringkat kedua pada tingkat SMK.<sup>18</sup>

Baiknya mutu pendidikan suatu daerah akan berdampak pada perekonomian suatu daerah. Pentingnya pendidikan bagi suatu masyarakat

---

<sup>14</sup> Nanda Anggara, *Pendidikan Bukittinggi Terbaik Lagi*, diakses dari <http://www.news.padek.co/detail/a/24923>, pada tanggal 4 april 2017 pukul 18.28.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Redaksi, *Inilah Ranking Kota/Kabupaten Tertinggi Hasil UN di Sumatra Barat Tahun Ajaran 2015/2016*, diakses dari <http://sumbar1.com/inilah-ranking-kotakabupaten-tertinggi-hasil-un-di-sumatra-barat-tahun-ajaran-20152016/>, pada tanggal 4 april 2017 pukul 18.11.

<sup>17</sup> Nanda Anggara, *loc.cit.*

<sup>18</sup> Redaksi, *loc.cit.*

menjadikan pemilihan terhadap lembaga pendidikan yang berkualitas menjadi prioritas. Kualitas pendidikan di kota Bukittinggi dan Padang tergolong yang terbaik di Sumatra Barat. Oleh karena itu, tidak sedikit dari penduduk luar daerah memilih menempuh pendidikannya di kota Bukittinggi dan Padang. Selain menjalankan segala bentuk aktivitas pendidikannya, si penuntut ilmu biasanya juga menjalankan aktivitas yang mendukung proses pendidikannya. Diantara aktivitas/kegiatan lain yang dilakukan adalah menjalankan kegiatan ekonominya sebagai konsumen. Contoh aktivitas sederhananya yaitu pemenuhan kebutuhan makan dan tempat tinggal. Banyaknya penuntut ilmu yang berdatangan akan berdampak kepada meningkatnya perputaran uang di daerah tersebut. Hal tersebut dapat di manfaatkan sebagai peluang usaha bagi masyarakat setempat, sehingga diharapkan meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

Potensi daerah akan dijadikan acuan dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD berisi tentang rencana keuangan daerah yang meliputi penetapan target penerimaan, anggaran untuk belanja, dan kegiatan lain dalam bentuk angka pada suatu periode. APBD memiliki dua unsur utama yaitu penerimaan dan belanja daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pengelolaan potensi-potensi suatu daerah. Potensi daerah yang beragam tentunya juga memberikan kontribusi yang berbeda dalam menghasilkan PAD. Potensi unggulan daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembentukan PAD. Dengan demikian, perlu upaya maksimal dalam mengelola potensi daerah agar

target penerimaan PAD terealisasi dan penerimaan terus mengalami peningkatan.

Berikut adalah tabel realisasi PAD kota Bukittinggi dan Padang tahun 2012 s.d. 2014.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi PAD Kota Bukittinggi dan Padang Tahun 2012-2014**

Tahun	Bukittinggi	Padang
2012	Rp.45.227.410.138,-	Rp. 189.450.840.000,-
2013	Rp.55.204.000.416,-	Rp. 238.871.890.000,-
2014	Rp.59.150.515.133,-	Rp. 315.678.800.000,-

Sumber data: <https://bukittinggikota.bps.go.id/> dan <https://padangkota.bps.go.id/>

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, realisasi penerimaan PAD kota Bukittinggi dan Padang dari tahun 2012-2014 sama-sama mengalami peningkatan. Artinya, kedua kota tersebut dapat dikatakan berhasil dalam mengelola potensinya dari tahun ke tahun. Tabel 1.1 juga memperlihatkan jumlah realisasi yang diterima kota Padang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Bukittinggi. Hal itu tidak terlepas dari berbedanya potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Banyaknya potensi suatu daerah berpengaruh kepada besar kecilnya realisasi penerimaan PAD. Daerah yang memiliki potensi lebih banyak dan beragam tentu lebih berhak untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar jika dikelola dengan baik.

Sumber penerimaan utama PAD adalah pajak dan retribusi daerah. Sektor pajak dengan kontribusi tertinggi di kota Bukittinggi pada tahun anggaran 2015 adalah pajak hotel sebesar Rp. 9.047.650.743,-. Adapun retribusi tertinggi terdapat pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp. 8.660.357.000,-. Sementara itu, kontribusi penerimaan tertinggi kota Padang pada sektor pajak dan retribusi adalah pajak penerangan jalan yaitu

sebesar Rp. 83.551.662.000,- dan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 15.746.890.000,-.

Berdasarkan data realisasi pajak dan retribusi dengan kontribusi tertinggi di atas, maka dapat dilihat bahwa potensi unggulan daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan PAD. Pajak hotel dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga berasal dari pengelolaan potensi unggulan kota Bukittinggi yaitu pariwisata. Adapun pajak penerangan jalan dan retribusi pelayanan kesehatan berkaitan erat dengan potensi sumber daya manusia yang dimiliki kota Padang. Jadi, baiknya pengelolaan terhadap potensi-potensi daerah berbanding lurus dengan besarnya kontribusi yang diberikan terhadap pembentukan PAD.

Pengelolaan keuangan yang baik terhadap PAD dapat dijadikan indikator baiknya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. PAD yang meningkat diharapkan mampu membiayai belanja daerah secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dan pihak lain.

Selain mengelola penerimaan daerah, pemerintah daerah juga harus optimal dalam mengelola belanja daerah. Besarnya realisasi belanja kota Bukittinggi dan Padang tahun anggaran 2012-2014 akan disajikan pada tabel 1.2 di halaman berikutnya.

Tabel 1.2 memperlihatkan alokasi belanja kota Bukittinggi dan Padang dari tahun 2012-2014 selalu mengalami peningkatan. Belanja daerah secara umum terbagi dua yaitu belanja operasi dan belanja modal. Artinya, kedua kota

tersebut sama-sama meningkatkan alokasi dana untuk belanja operasi maupun belanja modalnya.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Belanja Kota Bukittinggi Dan Padang Tahun Anggaran 2012-2014**

Tahun	Bukittinggi	Padang
2012	Rp. 447.443.000.000,-	Rp. 1.400.212.400.000,-
2013	Rp. 504.110.000.000,-	Rp. 1.619.577.680.000,-
2014	Rp. 542.050.000.000,-	Rp. 1.794.324.390.000,-

Sumber data: <https://bukittinggikota.bps.go.id/> dan <https://padangkota.bps.go.id/>

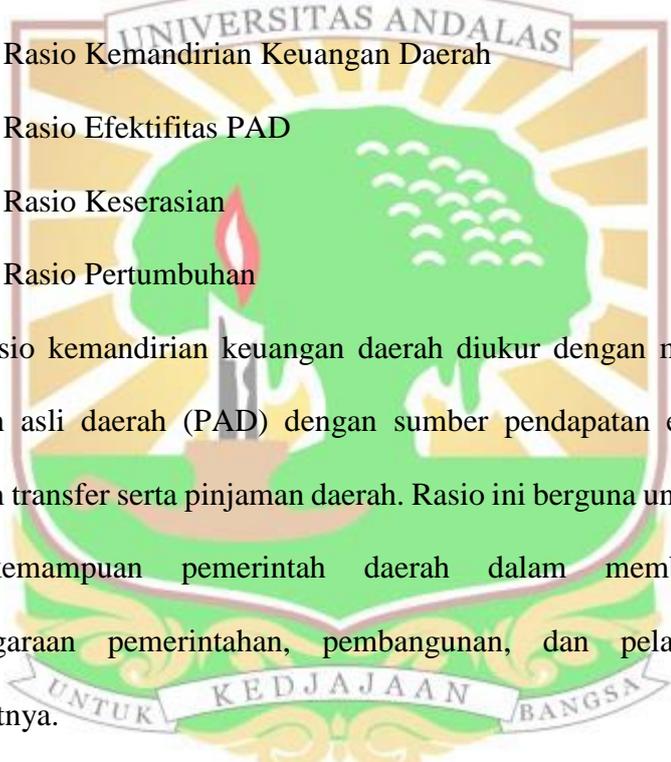
Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 di atas, penerimaan yang berasal dari PAD kota Bukittinggi dan Padang tidak sebanding dengan besarnya dana untuk belanja daerahnya. Untuk itu, setiap daerah harus terus berupaya meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat meningkatkan tercapainya target yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahannya secara lebih mandiri.

Besarnya realisasi PAD kota Padang dibandingkan dengan Bukittinggi tidaklah dapat dijadikan tolok ukur baik buruknya kedua kota dalam pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis khusus untuk mengungkap kinerja daerah dalam mengelola keuangan yang tercermin pada APBD. Salah satu alat analisis terhadap data keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan. Menurut Halim, analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD.<sup>19</sup> Dengan demikian, untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan kota Bukittinggi

<sup>19</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 241.

dengan Padang dapat dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan daerah tersebut.

Belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukuran pada analisis rasio sektor publik, sehingga pengukuran yang dilakukan masih bisa dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Adapun rasio yang dipilih sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
  2. Rasio Efektifitas PAD
  3. Rasio Keserasian
  4. Rasio Pertumbuhan

Rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan sumber pendapatan eksternal berupa pendapatan transfer serta pinjaman daerah. Rasio ini berguna untuk mengetahui tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakatnya.

Rasio efektifitas PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini berguna untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD berdasarkan target yang telah ditetapkan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 232-235.

Rasio keserasian terbagi menjadi dua komponen yaitu rasio belanja operasi dan belanja modal. Rasio belanja operasi menunjukkan besar kecilnya belanja operasi dibandingkan dengan total belanja. Adapun rasio belanja modal menunjukkan besarnya belanja modal dibandingkan dengan total belanja. Rasio keserasian berguna untuk mengetahui besarnya proporsi dana yang dialokasikan untuk belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Rasio pertumbuhan diukur dengan membandingkan komponen penerimaan atau pengeluaran pada suatu periode dengan periode sebelumnya. Rasio ini berguna untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, kinerja keuangan kota Bukittinggi dan Padang dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan tersebut. Hasil perhitungan rasio keuangan masing-masing daerah tersebut perlu dibandingkan dan dianalisis untuk menilai kinerja keuangan daerah. Akhirnya, apakah analisis perbandingan rasio keuangan yang dilakukan dapat mengungkap kinerja keuangan mana yang lebih baik antara kota Bukittinggi dengan Padang atau tidak.

Penelitian terdahulu yang relevan telah dilakukan Nandisha dengan judul "Analisis perbandingan kinerja keuangan daerah antara pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Riau periode 2011-2013". Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Jenis data pada penelitian ini yaitu data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari *website* resmi DJPK. Analisis yang

dilakukan yaitu membandingkan tingkat kemandirian keuangan daerah, efektifitas penerimaan PAD, dan pertumbuhan PAD.<sup>21</sup>

Penelitian lain oleh Oktavianus, Donny dkk. tentang Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Kota Bitung dan Tomohon Periode Anggaran 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif komparatif dan sumber data yaitu data sekunder yang berupa laporan realisasi APBD Kota Bitung dan Tomohon periode 2010 sampai dengan 2014. Analisis data menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, indeks kemampuan rutin, keserasian dan pertumbuhan.<sup>22</sup>

Penelitian serupa dilakukan oleh Perdana tentang analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Kalimantan. Peneliti menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD serta APBD Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan tahun 2012 dan 2013. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Cara ini membandingkan kedua Pulau dengan rasio kinerja keuangan yang dipilih yaitu efektifitas, pertumbuhan, aktifitas, kemandirian, DSCR, dan efisiensi. Kemudian melakukan analisis deskriptif terhadap perbedaan pada data kuantitatif tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah uji hipotesis berupa uji beda dengan menggunakan *t-test two sample independent* dan uji *Mann Whitney* setelah

---

<sup>21</sup> Molynda Nandisha, "Analisis perbandingan kinerja keuangan antara pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Riau periode 2011-2013" (Padang: Skripsi Universitas Andalas, 2015), hlm. 25-28.

<sup>22</sup> Donny Oktavianus, Sri Murni, Ivonne S. Saerang, "Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Kota Bitung dan Tomohon Periode Anggaran 2010-2014", *Jurnal EMBA Vol. 3, No. 3, 2015*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9716>, hlm. 928.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 929-932.

dilakukan uji normalitas untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak.<sup>23</sup>

Umar melakukan penelitian tentang Analisis perbandingan kinerja keuangan daerah antara kabupaten Tanah Datar dan kabupaten Agam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan empiris. Sumber data yaitu data sekunder yang bersumber dari APBD dan realisasi APBD periode 2009-2013. Adapun alat analisis yang digunakan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, efektifitas penerimaan PAD, *growth* PAD, *share* PAD terhadap belanja daerah. Selanjutnya, peneliti melakukan uji normalitas data dan uji T sampel independen untuk mengetahui signifikansi perbedaan kinerja keuangan.<sup>24</sup>

Adapun penelitian yang akan penulis lakukan yaitu analisis perbandingan rasio antara kota Bukittinggi dengan Padang. Data yang akan diolah bersumber dari laporan realisasi APBD yang diperoleh langsung dari Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Bukittinggi dan Padang. Data laporan realisasi APBD yang akan diteliti yaitu selama tiga tahun anggaran (2014-2016), sehingga diharapkan memberikan informasi mengenai kondisi terkini mengenai kinerja keuangan daerah yang bersangkutan. Perbedaan berikutnya yaitu pada pemilihan rasio keuangan. Rasio keuangan yang dipilih yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, efektifitas PAD, keserasian dan pertumbuhan. Analisis yang akan dilakukan yaitu dengan

---

<sup>23</sup>Romi Perdana, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi di Pulau Jawa dan Kalimantan." Bandung: Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia. <http://repository.upi.edu/id/eprint/21952>, 2016.

<sup>24</sup>Arif Maulana Umar. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam" (Padang: Skripsi Universitas Andalas, 2015), hlm. 47-55.

membandingkan rasio-rasio yang dimiliki kota Bukittinggi dengan rasio-rasio kota Padang. Kemudian menganalisis perbedaan yang muncul dari perbandingan tersebut dengan analisis deskriptif. Setelah itu, dilakukan pengujian statistik untuk mengetahui signifikansi dari perbedaan kinerja keuangan kota Bukittinggi dengan Padang menggunakan uji t sampel independen.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana perbandingan kinerja keuangan kota Bukittinggi dengan Padang pada periode anggaran 2014-2016?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengungkap perbedaan kinerja keuangan kota Bukittinggi dengan Padang menggunakan rasio-rasio keuangan daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan diperoleh pada penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan dan untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis terkait pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan rasio keuangan.
2. Bagi instansi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah kota Bukittinggi dan Padang terutama bagi perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan di masa depan.

3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian sejenis.

